

BAB VI

SARAN

Saran yang dapat disampaikan dari hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Viva Generik Bluru Kidul adalah sebagai berikut:

- a. Sebelum melaksanakan PKPA, hendaknya mahasiswa calon apoteker membekali diri dengan ilmu pengetahuan praktis yang berhubungan dengan anatomi dan fisiologi tubuh, terapi dan tata laksana suatu penyakit (*degenerative*), selain itu membekali diri pula mengenai pengetahuan dalam pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan, undang-undang kefarmasian serta manajemen apotek agar dalam melakukan PKPA di apotek dapat bertindak secara efektif dan efisien.
- b. Mahasiswa calon apoteker hendaknya berperan aktif dan antusias dalam melaksanakan semua kegiatan PKPA di Viva Generik agar dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan dalam pelayanan dan pengelolaan apotek sehingga kelak dapat menerapkannya dalam menjalankan praktik profesi di tengah masyarakat.
- c. Mahasiswa calon apoteker diharapkan mempelajari pentingnya sistem pengaturan untuk menghindari kesalahan dalam pengerjaan resep.
- d. Pemberian KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) kepada pasien perlu ditingkatkan sehingga pasien benar-benar paham cara penggunaan obat yang diperoleh dan dapat menambah kepatuhan pasien dalam menggunakan obat sehingga obat tersebut mampu memberikan efek terapi yang diharapkan.

- e. Penyediaan tempat khusus untuk konseling sangat memberikan keuntungan bagi pasien, agar dapat menambah kesan privasi dan kenyamanan kepada pasien. Harapannya agar pasien dapat memberikan informasi obat-obat yang sudah di gunakan dan keluhan-keluhan yang dirasakannya secara lengkap tanpa khawatir diketahui oleh pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Depkes RI., 1990, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 1990 tentang Obat Wajib Apotek.
- Depkes RI., 2002, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No, 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 992/Menkes/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, Jakarta.
- Depkes RI., Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/Menkes/SK/IX/2004 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Jakarta, 2004.
- Depkes RI., 2006, Pedoman Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas, Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- Depkes RI., 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Jakarta.
- Depkes RI., 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.
- Depkes RI., 2009, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Jakarta.
- Depkes RI., 2009, Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Jakarta.
- Depkes RI., 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Jakarta.
- Depkes RI., 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi, Jakarta.

- Lacy, F.C., Lora, L.A., Morton, P.G., and Leonard, L.L., 2008, Drug Information Handbook 17th ed., American Pharmacists Association, New York.
- Lacy, F.C., Lora, L.A., Morton, P.G., and Leonard, L.L., 2009, Drug Information Handbook 17th ed., American Pharmacists Association, New York.
- McEvoy, Gerald K., *et al.*, 2011, AHFS Drug Information, American Society of Health-System Pharmacist, Bethesda, Maryland.
- Seto S., Nita Y., Triana L., 2012, Manajemen Farmasi, ed 3, Airlangga University Press, Surabaya.
- Sweetman, S.C., 2009, Martindale: The Complete Drug Reference 36th ed., Pharmaceutical Press, London.